

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah mengalami reformasi keuangan sejak terbitnya undang-undang yang menjadi paket terkait dengan pengaturan keuangan pada negara yang berjumlah tiga buah undang-undang yaitu UU No.17 tahun 2003 membahas mengenai Keuangan Negara, UU No.1 tahun 2004 berisi tentang Perbendaharaan Negara, dan yang terakhir UU No.15 tahun 2004 mengenai Pemeriksaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Mendasari pada UU No.17 Tahun 2003, Keuangan Negara merupakan seluruh kewajiban dan hak yang dimiliki negara yang bisa dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang maupun barang dan dapat dijadikan sebagai milik negara dan berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan negara diwujudkan dalam pelaksanaan anggaran negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proses pelaksanaan anggaran dimulai sejak disahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). DIPA merupakan dokumen yang dijadikan batas tertinggi yang dirancang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). Di dalam DIPA terdapat dua mekanisme pembayaran yaitu secara langsung melalui (LS) dan

dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) atau dalam istilah akuntansi lebih dikenal dengan *petty cash*. UP merupakan uang muka untuk kerja dengan jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja sehari-hari.

Lahirnya revolusi 4.0 ditandai dengan penggunaan internet pada setiap lini kehidupan, bahkan pada sektor pemerintahan. Pemerintahan beradaptasi dengan adanya perkembangan teknologi ini salah satunya dengan diterapkannya *cashless* dalam transaksi apalagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang telah terjadi penyebarannya di Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020 lalu. Sebagaimana amanah yang sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.196/PMK.05/2018 yang telah direvisi dengan PMK No.97/PMK.05/2021 mengenai Tata Cara Melakukan Pembayaran dan Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah. Adanya Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ini sebagai bentuk penerapan asas optimalisasi dan efektifitas pada *idle cash* di rekening yang dikelola bendahara.

Sejalan dengan pernyataan dari *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* bahwasanya tata pengelolaan pemerintahan yang baik harus mempunyai delapan karakteristik yaitu partisipatif, efektif dan efisien, akuntabel, pelayanan prima, responsif, transparan, adil dan inklusif dan mengikuti aturan hukum (Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, 2016).

Efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan negara yaitu memenuhi, menciptakan proses, dan sistem kelembagaan yang dapat menghasilkan kebutuhan masyarakat yang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada pada negara itu sendiri.

Tujuan dalam penggunaan KKP ini sejalan dengan penerapan digitalisasi kas yaitu sebagai berikut.

- a. Menekan penggunaan uang tunai dalam melakukan transaksi berkaitan dengan keuangan negara.
- b. Peningkatan terhadap keamanan dalam menjalankan transaksi.
- c. Meminimalisasi adanya kemungkinan *fraud* dari pembayaran transaksi secara tunai.
- d. Meminimalkan adanya *cost of fund/idle cash* dari penggunaan UP.

UP dalam bentuk limit kartu kredit yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran dapat digunakan untuk membayar atas transaksi dari Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Lain-lain. Perbandingan besaran antara UP tunai dengan UP KKP adalah 60% banding 40%. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) melakukan pembayaran dengan menggunakan UP kepada satu penerima/penyedia barang/jasa dengan nilai maksimal sebesar Rp50.000.000,00 kecuali digunakan untuk pembayaran perjalanan dinas dan honorarium. Bendahara Pengeluaran dapat meminta penggantian (*revolving*) Uang Persediaan apabila penggunaan UP sudah mencapai 50% (lima puluh persen) (Sriyani, 2020).

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang penggunaan UP, berikut rumusan masalah yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) penulis adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan teori yang dipelajari di bangku perkuliahan terkait penggunaan UP KKP dengan penerapannya di KPPN Banyuwangi?

2. Bagaimana proses pembukuan UP KKP di KPPN Banyuwangi?
3. Masalah dan kendala apa saja yang terjadi dalam proses pembukuan UP KKP di KPPN Banyuwangi?

1.3 Tujuan Penulisan

Yang menjadi tujuan penulisan dari penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui kebenaran atau kesesuaian teori yang dipelajari penulis selama masa perkuliahan dengan praktiknya di KPPN Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui proses pembukuan atas penggunaan dan pertanggungjawaban UP KKP yang dikelola oleh bendahara di KPPN Banyuwangi.
3. Untuk mengetahui masalah dan kendala yang mungkin terjadi selama proses penggunaan maupun pembukuan UP KKP di KPPN Banyuwangi.

1.4 Ruang Lingkup

Penulis membatasi penulisan dan penelitian pada karya tulis tugas akhir ini hanya di lingkup pembukuan transaksi yang menggunakan KKP di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banyuwangi khususnya pada tahun 2021. Penulis juga berencana melakukan pengambilan data saat praktik kerja lapangan dilaksanakan yaitu mulai tanggal 14 februari sampai 8 april 2022. Pembatasan ruang lingkup penulisan dimaksudkan agar penulis mudah dalam mendapatkan data yang dibutuhkan serta mengaplikasikan teori dan ilmu yang didapat selama bangku perkuliahan. Pengambilan data saat dilaksanakannya praktek kerja di lapangan juga dimaksudkan agar penulis dapat mendapatkan data

secara lengkap sebelum perkuliahan kembali dilaksanakan sehingga memiliki waktu yang cukup untuk mengolah data.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan penulis pada penyusunan tugas akhir ini sebagai berikut.

1. Menambah pengetahuan dan juga wawasan bagi penulis terkait dengan pengelolaan serta pembukuan UP KKP yang dikelola Bendahara Pengeluaran KPPN Banyuwangi.
2. Sebagai bahan evaluasi pengelolaan pembukuan UP KKP yang dikelola Bendahara Pengeluaran di KPPN Banyuwangi.
3. Dapat menjadi tinjauan refleksi atas pembukuan UP KKP yang dikelola Bendahara Pengeluaran di KPPN Banyuwangi.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan proses penyelesaian tugas akhir ini menggunakan metode sebagai berikut.

1.6.1 Tempat dan Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis meninjau pembukuan KKP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran di KPPN Banyuwangi. Adapun yang menjadi subjeknya adalah KPPN Banyuwangi selaku kuasa BUN, KPPN sebagai satuan kerja, dan pembukuan atas KKP menjadi objek penelitiannya.

1.6.2 Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan merupakan metode dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan menelaah pada literatur, buku, peraturan, catatan, dan laporan

yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis. Pencarian data dapat dilakukan secara langsung (data dapat didapat secara langsung di lapangan) maupun tidak langsung (dapat dilakukan secara *online* melalui media sosial atau melalui *website*).

1.6.3 Studi Lapangan

a. Wawancara

Penelitian menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara adalah metode dimana terdapat percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Perbincangan ini dapat dilakukan dengan dua pihak yaitu pewawancara (interview) atau pihak yang memberikan pertanyaan kritis dengan narasumber atau pihak yang memberikan informasi atau menjawab pertanyaan. Melalui wawancara yang dilakukan diharapkan dapat menjawab dan melengkapi data sebagai bahan penyusunan karya tulis tugas akhir ini. Menggunakan metode wawancara ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut.

- a. Sejak kapan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banyuwangi memberlakukan pembayaran dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah.
- b. Apakah pembukuan UP KKP yang dikelola Bendahara Pengeluaran di KPPN Banyuwangi sudah sesuai dengan teori atau peraturan yang berlaku.
- c. Apa saja kendala yang dialami selama penggunaan KKP oleh Bendahara Pengeluaran di KPPN Banyuwangi.
- d. Menurut Bendahara Pengeluaran di KPPN Banyuwangi apa kelemahan dan juga kelebihan yang dirasakan dari penggunaan KKP.

Wawancara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara virtual maupun secara langsung. Dengan perkembangan kasus Covid-19 ini sangat dimungkinkan sekali wawancara dilakukan secara virtual, baik melalui *chat*, telepon atau *zoom meeting*. Tentunya setiap metode wawancara memiliki sisi negatif dan positifnya masing-masing.

b. Observasi

Ketika penelitian sudah menggunakan metode wawancara bisa jadi data yang didapatkan merupakan bentuk pandangan atau perspektif dari narasumber saja. Oleh karena itu, untuk lebih memperkuat dan menunjang validitas data yang didapatkan maka penulis melengkapinya dengan data yang didapat dari metode observasi. Observasi bermanfaat untuk mengumpulkan gambaran dari suatu kejadian atau peristiwa yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan peneliti.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian penulis menggunakan metode dokumentasi untuk memberikan gambaran secara real yang akan disajikan penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir nanti. Metode dokumentasi akan memberikan keadaan secara nyata dari objek penelitian penulis.

1.7 Sistematika Penulisan KTTA

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

HALAMAN PERSETUJUAN DARI TIM PENILAI KARYA TULIS TUGAS AKHIR

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan memberikan gambaran secara umum dari tugas akhir yang direncanakan untuk disusun. Gambaran umum meliputi ini berisi latar belakang penulisan, tujuan, ruang lingkup pembahasan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan karya tulis tugas akhir. Gambaran umum ini juga berisi alasan penulis mengambil topik yang akan dibahas serta menjelaskan rumusan masalah yang akan diteliti untuk mendapatkan kesimpulan dan manfaat dari penulisan tugas akhir ini.

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penulisan

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

1.5 Manfaat Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi penjelasan terkait data dan juga fakta yang telah penulis dapatkan selama penelitian diantaranya adalah visi misi, struktur organisasi, tugas dan fungsi, dan penjelasan mengenai Uang Persediaan dalam Kartu Kredit Pemerintah.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Tinjauan

2.1.2 Bendahara Pengeluaran

2.1.3 Uang Persediaan

2.1.4 Konsep Kartu Kredit Pemerintah

2.1.5 Teori Penerapan UP Kartu Kredit Pemerintah

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab tiga ini penulis akan menguraikan metode-metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data seperti sumber data primer maupun sekunder serta melalui wawancara maupun dengan observasi. Penulis juga akan memaparkan teori beserta penjelasan yang digunakan untuk mengulas permasalahan-permasalahan yang diambil pada bab sebelumnya. Penulis juga akan memberikan gambaran dari penggunaan dan juga pembukuan Uang Persediaan dalam Kartu Kredit Pemerintah yang dikelola Bendahara Pengeluaran di KPPN Banyuwangi.

3.1 Metode Pengumpulan Data

3.1.1 Metode Wawancara

3.1.2 Studi Kepustakaan

3.2 Pembahasan

3.2.1 Penerapan UP KKP di KPPN Banyuwangi

3.2.2 Satuan Kerja yang Menggunakan KKP

3.2.3 Alur Permintaan UP KKP

3.2.4 Proporsi UP dan Jenis KKP

3.2.5 Pemegang, Kelebihan, dan Kekurangan KKP

3.2.6 Pelaksanaan dan Bukti Pembayaran

3.2.7 Pembukuan UP KKP

3.2.8 Pengawasan dan *Monitoring*

BAB IV SIMPULAN

Simpulan dan saran akan dipaparkan penulis pada bab ini yang diambil dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya dengan harapan dapat berguna untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini berisi data dan juga sumber-sumber yang dijadikan penulis sebagai rujukan maupun referensi dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir.

LAMPIRAN

Bagian ini berisi lampiran yang akan disertakan penulis dalam penyusunan KTTA ini.